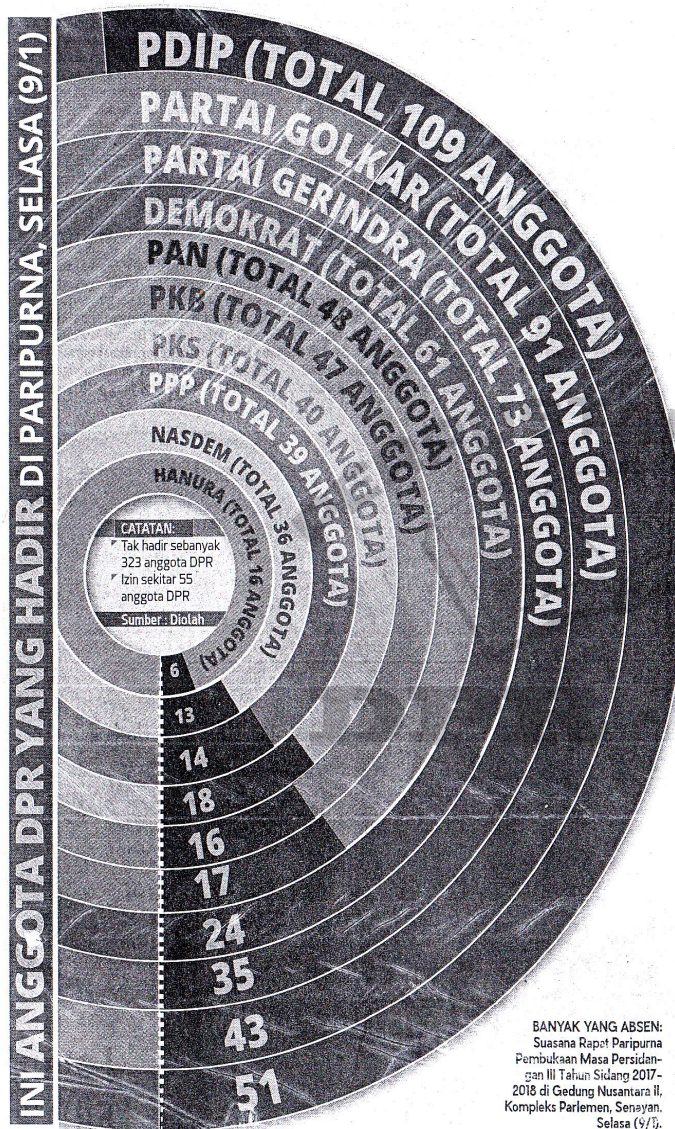


Judul : Lagi-lagi Paripurna DPR Sepi  
Tanggal : Rabu, 10 Januari 2018  
Surat Kabar : Indo Pos  
Halaman : 1-7



# Lagi-Lagi Paripurna DPR Sepi

Akibat Masuk Tahun Politik, Tak Bahas Ketua DPR Definitif

JAKARTA—Lagi-lagi sidang Paripurna DPR sepi anggota Dewan. Pemandangan ini tampak saat lembaga legislatif itu menggelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2017-2018 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (9/1). Dari total 560 anggota dewan, sebanyak 237 orang hadir dalam rapat tersebut. Sementara, sekitar 323 anggota Dewan tak hadir, sebanyak 55 orang menyatakan izin dan sisanya tanpa keterangan. Paripurna dipimpin Plt Ketua DPR RI, Fadli Zon.

» Baca Lagi-Lagi...7

“Saya sesali pula bila pembukaan masa sidang di awal 2018 ini belum mengagen-dakan soal penetapan Ketua DPR RI defenitif pengganti Setya Novanto.”

Agus Hermanto  
Wakil Ketua DPR RI



CHARLES LUYET/ISI



## Lagi-Lagi Paripurna DPR Sepi

» Sambungan dari halaman 1

Selain Fadli, pimpinan DPR yang hadir yakni, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dan Agus Hermanto. Rapat Paripurna pun berjalan tanpa adanya interupsi dan terbilang paling cepat. Pasalnya, dibuka sekitar pukul 10.45 WIB dan berakhir sedikit pukul 11.00 WIB. Situasi ini berbeda dengan rapat paripurna pada Kamis (7/10) lalu yang diwarnai interupsi sejumlah fraksi.

Ini terkait pengakuan sepihak Amerika Serikat (AS) terhadap Jerusalem ataupun paripurna sebelum-sebelumnya.

Plt Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, kehadiran anggota dewan terhambat sepi mengingat rapat paripurna itu diadakan pada awal tahun politik. Pilkada Serentak di 171 daerah akan diselenggarakan pada 27 Juni 2018 dan Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden pada 2019.

Dalam Rapat Paripurna 2018, Fadli menuturkan, memasuki masa sidang III/2017-2018, DPR akan melanjutkan pembahasan terhadap 21 RUU (rancangan undang-undang) prioritas tersebut dan tiga RUU kumulatif terbuka. Selain melanjutkan pembahasan, terdapat pula enam RUU yang sedang dalam proses harmonisasi dan 11 RUU dalam proses penyusunan. "Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, memasuki masa sidang ini, DPR akan melanjutkan pembahasan terhadap 21 RUU prioritas 2018 dan tiga RUU kumulatif terbuka yang diharapkan dapat selesai pada masa sidang ini," ujar Fadli saat membacakan pidato pembukaan, kemarin.

Politisi Partai Gerindra itu juga mengingatkan, masa persidangan ini singkat, pimpinan DPR meminta Komisi, Pansus (Panitia Khusus), dan Badan Legislasi untuk segera menyelesaikan penyusunan, harmonisasi dan pembahasan RUU.

Di samping itu, Fadli juga meminta pemerintah tetap fokus dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang telah berjalan meskipun akan menghadapi tahun politik pada 2018 dan 2019. "Meskipun Indonesia akan menghadapi Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019, DPR meminta pemerintah agar tetap fokus dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang telah berjalan selama ini," tuturnya.

Fadli berharap pemerintah dapat memanfaatkan peluang perbaikan ekonomi global saat ini dengan menjaga kondisi moneter maupun fiskal yang stabil. Dengan demikian, dapat menjadi stimulus dalam percepatan dan pemerataan pembangunan serta peningkatan pertumbuhan ekonomi. "Terlebih lagi pada 2017 Indonesia memperoleh kenaikan peringkat investasi dari lembaga pemeringkat internasional serta kenaikan peringkat kemudahan berbisnis dari Bank Dunia," ucapnya.

Selain itu, lanjut Fadli, dalam pelaksanaan fungsi anggaran, DPR mendorong pemerintah konsisten untuk merealisasikan anggaran sesuai peruntukannya. DPR juga mengingatkan pemerintah agar anggaran yang telah dialokasikan segera dilaksanakan dan dioptimalkan penggunaannya. "Ini terutama anggaran yang mampu menstimulus konsumsi masyarakat lebih baik dari 2017," tandasnya.

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto juga menyela paripurna kali ini sepi dan tidak langsung menetapkan Ketua DPR pengganti Setya Novanto (Setnov). "Saya sesali pula bila pembukaan masa sidang di awal 2018 ini belum mengendahkan soal penetapan Ketua DPR RI definitif pengganti Setya Novanto," kata politisi partai Demokrat itu di lokasi yang sama.

Agus menyatakan, jika usai paripurna Golkar telah mengusulkan nama Ketua DPR, maka selanjutnya sisa dibahas saat Rapat Pimpinan (Rapim). "Setelah paripurna apabila usulan dari Fraksi Partai Golkar untuk pimpinan ketua DPR sudah masuk," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu juga Agus memberikan terkait RUU prioritas 2018 dan tiga RUU kumulatif terbuka, yakni rancangan tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pemerintahan Negara Bukan Pajak, Larangan Minuman Beralkohol, Wawasan Nusantara, dan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Ada juga, kata Agus, rancangan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; Kekarantinaan Kesehatan; Kewirausahaan Nasional; Ekonomi Kreatif; Pertanian; Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan; Perkoperasian; Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah; Jabatan Hakim; serta Perubahan Kedua atas UU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. "Rancangan lain yang menjadi prioritas untuk dibahas adalah Pertambangan; Perubahan atas UU No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Perubahan atas UU No 18/2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi," urainya.

Prioritas lainnya, lanjut Agus, adalah Pengesahan Protocol to Implement the Sixth Package of Commitments on Financial Services under The ASEAN Framework atau protokol untuk melaksanakan paket komitmen keenam bidang jasa keuangan dalam persetujuan kerangka kerja ASEAN di bidang jasa; Penghapusan Kekerasan Seksual; dan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dia menambahkan, adapun rancangan undang-undang kumulatif terbuka adalah RUU tentang Mahkamah Konstitusi, Pengesahan Persetujuan Kerjasama Pertahanan

antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Arab Saudi, dan Daerah Kepulauan. RUU kumulatif terbuka adalah RUU di luar program legislasi nasional yang dalam keadaan tertentu dapat diajukan oleh DPR atau Presiden.

"Sementara enam RUU yang sedang proses harmonisasi, pembidatan, dan pemantapan konsesi yaitu, RUU Penyiaran, Minyak dan Gas Bumi, Perkelapaan, Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, EUMN, serta Perlindungan dan Pengakuan atas Hak," ujarnya.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memastikan hingga kemarin belum menerima surat dari Fraksi Partai Golkar terkait nama yang diajukan sebagai Ketua DPR pengganti Setnov. "Surat dari Fraksi Partai Golkar belum masuk di Pimpinan DPR hingga pagi ini (kemarin, Red). Karena itu, kami akan tetap menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) setelah Rapat Paripurna DPR untuk menyampaikan kembali pesan, sebaiknya Ketua DPR tidak boleh terlalu lama diberikan kosong," katanya kepada wartawan.

Ketua DPR, sambung Fahri, tidak boleh terlalu lama kosong lantaran banyak hal-hal yang harus diselesaikan dengan komposisi kepemimpinan yang dipimpin Ketua DPR definitif. "Kalau sudah ada permintaan melantik Ketua DPR oleh Golkar baru Pimpinan DPR mengadakan Rapim sebelum dilakukan Rapat Paripurna DPR," jelasnya.

"Tapi Senin (8/1) malam hingga Selasa (9/1) pagi tidak ada surat permohonan pelantikan Ketua DPR yang baru," tandasnya.

Sementara itu, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tak mau disalahkan soal molornya penetapan Ketua DPR definitif dan penambahan kursi pimpinan. Wakil Ketua Baleg DPR RI Firmansyah Soebagyo menyatakan, sejauh ini proses pembahasan revisi UU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) berjalan lancar. Dalam penambahan Pimpinan DPR hampir semua fraksi menyepakati untuk penambahan satu kursi Wakil Ketua DPR. Namun, penambahan Wakil Ketua MPR masih belum dicapai kesepakatan.

"Sebetulnya tinggal menentukan dua pasal saja, pasal yang menyangkut penambahan pimpinan DPR sudah clear, tinggal penambahan MPR saja yang kami putuskan. Saya rasa tidak ada yang sulit," katanya kepada wartawan, kemarin.

Firman meyakini Baleg tak akan kesulitan untuk mengambil keputusan terkait penambahan kursi Wakil Ketua DPR dan MPR bagi partai peraih kursi terbanyak di DPR, yakni PDIP. Setelah semua itu diputuskan, Baleg akan menunggu Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari pemerintah terkait revisi UU MD3. "Harapan kami pada Januari ini selesai semua seperti beberapa undang-undang yang ting-

gal menyelesaikan pasal-pasal. Tidak begitu rumit, hanya tergantung hasil kesepakatan saja," lanjut politisi Golkar itu.

Sementara soal Ketua DPR definitif, Firmansyah mengaku, hal itu bukanlah kewenangan Baleg DPR RI, namun kewenangan Fraksi Partai Golkar DPR RI. "Belum dilantiknya Ketua DPR baru karena memang belum ada usulan dari Partai Golkar," pungkasnya.

Diketahui, Partai Golkar belum memutuskan sosok yang akan menggantikan posisi Setnov sebagai Ketua DPR. Ketua DPP Partai Golkar Zainudin Amali sebelumnya menuturkan, pihaknya menunggu revisi UU MD3. Pembahasan soal penambahan pimpinan DPR RI tersebut kini tengah dibahas di Baleg DPR. Sementara, Sekretaris Fraksi Partai Golkar Agus Gumilang Kartasasmita membenarkan bahwa penggantian ketua DPR yang diajukan fraksinya dibarengi dengan penambahan kursi pimpinan DPR untuk PDI-P.

**PDIP 'Ngambek'**  
Realisasi penambahan kursi pimpinan DPR RI untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih simpang siur karena belum ada jadwal pasti. Alhasil, partai berambing-ambing moncong putih itu terkesan 'ngambek' dalam menyikapi hal tersebut. Bahkan, partai besutan Megawati Soekarnooputri itu berniat membatalkannya.

Politikus PDIP Aria Bima menilai penambahan kursi pimpinan parlemen untuk partainya dalam revisi UU No 17/2014 tentang MD3 tidak perlu. Karena, usulan itu hanya akan menimbulkan kegaduhan di DPR. Terlebih, masih banyak pekerjaan rumah DPR yang perlu dituntaskan dan masa jabatan DPR periode ini hanya sekitar dua tahun. "Kalau hanya membuat keributan dan menimbulkan banyak resistensi, sebaiknya enggak perlu ada penambahan kursi pimpinan DPR. Daripada ribut dan geger terus. Kita malu. Banyak yang harus diselesaikan," ungkapnya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (9/1).

Dia menjelaskan, usulan penambahan kursi pimpinan parlemen tidak terkait dengan jabatan Ketua DPR. Penambahan kursi pimpinan DPR itu untuk mengoptimalkan kinerja lembaga legislatif tanpa kegaduhan.

Lebih lanjut Aria menuturkan, banyak target legislasi yang harus diselesaikan DPR dalam memasuki tahun politik ini. "Jadi, untuk mengoptimalkan kinerja. Kita ingin penambahan itu enggak membuat gaduh," tandasnya.

Wakil Ketua Baleg dari Fraksi Golkar Firmansyah Soebagyo menyatakan, DPR masih menunggu pandangan pemerintah untuk melanjutkan pembahasan revisi UU MD3 terkait penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR.

Menurut dia, pembahasan revisi UU MD3

bisa berjalan jika pemerintah telah mengeluarkan sikap soal jumlah kursi yang ditambah di pimpinan DPR dan MPR. "Revisi UU MD3 saat ini posisinya adalah tinggal menunggu keputusan dari pemerintah," ucapnya.

Firman menambahkan, jumlah penambahan kursi di tingkat Baleg DPR masih belum pasti. Beberapa fraksi berharap penambahan kursi tidak hanya bagi parpol pemenang pemilu, melainkan untuk seluruh fraksi di DPR dan MPR. "Dinamika berkembang ada usulan ditambah dua, tiga. Ada juga satu fraksi yang mengusulkan ditambah enam kursi," ujarnya.

Meski segala usulan tidak bisa ditolak, Firmansyah menegaskan, penambahan kursi pimpinan DPR/MPR harus rasional. Polemik akan terjadi jika seluruh fraksi bersikeras mendapat jatah kursi pimpinan DPR. "Tidak mungkin kalau pimpinan DPR tambah enam, tapi kalau tambah dua masih memungkinkan. Jadi rasional politik saja yang kita pakai," imbuhnya.

Di sisi lain, Firmansyah menyebut, tidak ada batas waktu pembahasan revisi UU MD3. Pembahasan akan semakin cepat jika seluruh partai dan pemerintah memiliki titik baik untuk segera menyelesaikan revisi UU tersebut. Revisi UU MD3 hanya mengubah dua pasal, yakni pasal soal jumlah pimpinan DPR dan pimpinan MPR. "Ini sudah jadi kesepakatan sebelumnya melalui rapat paripurna DPR sebelumnya. Jadi tidak ada yang dipersulit," pungkasnya.

Lebih dari itu, Firmansyah berharap pengambil keputusan revisi UU MD3 dilakukan lewat musyawarah mufakat. "Tidak semua diputuskan melalui voting. Kalau bisa melalui asas musyawarahkan lebih bagus," ujarnya.

Sementara, Sekretaris Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid mengatakan, partainya menyarankan kepada Partai Golkar agar tidak perlu menunggu revisi UU MD3 tuntas untuk mengajukan nama calon Ketua DPR pengganti Setnov. Pasalnya, revisi UU itu biasanya membutuhkan waktu yang panjang. Adapun revisi UU MD3 dimaksudkan terkait penambahan kursi pimpinan parlemen untuk PDIP. "Makanya pengisian posisi Ketua DPR tidak harus menunggu revisi UU MD3 mestinya," ujarnya.

Kendati demikian, dia tidak memperlakukannya dengan keinginan Partai Golkar itu. "Pintu masuknya memang revisi UU MD3," tandasnya. Dia juga menyarankan agar Partai Golkar melibatkan semua fraksi dalam memutuskan Ketua DPR pengganti Novanto.

"Sesungguhnya tidak harus dengan merevisi MD3," ucapnya.  
Jazilul menambahkan, revisi UU MD3 seharusnya dijadikan sebagai momentum untuk memperbaiki kinerja pimpinan DPR. "Semua fraksi di DPR memahami keadaan kinerja anggota DPR perlu diperbaiki termasuk citra," imbuhnya. (aen)